



Dinamika Implementasi Kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata pada Kepatuhan Pramuwisata Di Destinasi Tirta Empul

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Naufal Zacky Yanuarta Universitas Pendidikan Nasional naufalzacky21@gmail.com Ni Wayan Widhiasthini Universitas Pendidikan Nasional Widhiasthini74@undiknas.ac.id Ni Luh Yulyana Dewi Universitas Pendidikan Nasional yulyanadewi@undiknas.ac.id Ni Putu Bayu Widhi Antari Universitas Pendidikan Nasional Bayuwidhiantari@undiknas.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Syariah, M. J., Riskia, S. N., Fitrie, R. A. & Fanida, E. H. (2026). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2019-2025.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap kepatuhan pramuwisata di Destinasi Wisata Tirta Empul, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pramuwisata dalam mendukung kualitas pelayanan wisata dan pelestarian budaya Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 telah berjalan, namun belum optimal. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh pramuwisata secara merata, sementara pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian besar pramuwisata telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan telah terlaksana, namun efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan dukungan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan pramuwisata serta mendukung terwujudnya pariwisata budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan Pramuwisata, Pariwisata Budaya Bali

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Tourism Management Standards Policy on tour guide compliance at Tirta Empul Tourist Destination, Gianyar Regency. The study is motivated by the important role of tour guides in supporting service quality and preserving Balinese cultural values. A qualitative approach with a descriptive method was employed in this research. Data was collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of Bali Governor Regulation Number 52 of 2021 has been carried out but has not yet achieved optimal results. Policy dissemination has been conducted; however, it has not reached all tour guides evenly, while guidance and supervision remain limited. Most tour guides have demonstrated compliance with the established regulations, although several cases of non-compliance were still identified. In addition, coordination among stakeholders has been established, yet the effectiveness of monitoring and supervision requires further improvement. This study concludes that the success of policy implementation is influenced by effective communication, adequate resources, the commitment of policy implementers, and bureaucratic support. Therefore, strengthening policy dissemination, guidance, and continuous supervision is necessary to improve tour guide compliance and support the development of high-quality and sustainable Balinese cultural tourism.

Keywords: Policy Implementation, Tour Guide Compliance, Balinese Cultural Tourism

A. Pendahuluan

Standar penyelenggaraan pariwisata yang baik merupakan salah satu sektor elemen penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kepariwisataan merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam mendorong pelestarian budaya. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan kepariwisataan yang sesuai dengan standar serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah pramuwisata karena berperan memberikan informasi, pelayanan, dan membentuk citra destinasi wisata. Sumber daya manusia pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment) (Sutrisna & Lestari, 2021). Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, kualitas pelayanan pramuwisata menjadi semakin penting untuk menjaga kepuasan wisatawan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Bali. Pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan (Aprilliani et al., 2022).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan ini mengatur bahwa setiap pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), menggunakan busana adat Bali saat bertugas, serta memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan, seperti pramuwisata yang tidak memiliki KTPP, tidak menggunakan atribut sesuai ketentuan, hingga pengemudi yang merangkap sebagai pemandu wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tidak memiliki KTPP atau izin tersebut tidak ada jaminan bahwa seseorang pramuwisata atau guide merupakan seorang pemandu yang memenuhi kriteria yang mengatur bahwa pemandu wisata atau tour guide harus memiliki standar kompetensi untuk dapat diberikan sertifikat kompetensi (Winata et al., 2022).

Salah satu destinasi yang masih menghadapi permasalahan tersebut adalah Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, yang merupakan destinasi wisata budaya dan religi dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Tirta Empul sebagai tempat suci untuk peribadatan

umat Hindu juga merupakan daya tarik sendiri bagi wisatawan khususnya manca negara (Wijaya et al., 2022). Hasil pengawasan menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan, citra destinasi, dan keberlanjutan pariwisata budaya Bali. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dinamika implementasi kebijakan standar penyelenggaraan kepariwisataan terhadap kepatuhan pramuwisata di Destinasi Tirta Empul. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna menganalisis keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Metodologi

Kajian artikel yang berjudul “Dinamika Implementasi Kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Pada Kepatuhan Pramuwisata Di Destinasi Tirta Empul” disusun dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang bertujuan menggambarkan. Menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggambarkan deskriptif karna fokus pada utamanya menggambarkan bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana pramuwisata mematuhi standar yang berlaku. Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi menjelaskan keadaan, proses, serta faktor-faktor yang muncul secara nyata di lapangan. I Made Winarta menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang sedang diteliti ((Ridwan et al., 2021) Kemudian, Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan informan secara sengaja oleh peneliti dengan mempertimbangkan bahwa mereka memiliki informasi penting dan relevan dengan yang peneliti sedang teliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model miles dan huberman (1994) (dalam Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) model ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif dan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses implementasi dan dinamika dilapangan. Teknik ini mencakup tiga Teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data,

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data objek yang memberikan informasi penting untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Bentuknya dapat berupa orang, lokasi, benda ataupun dokumentasi yang menjadi dasar informasi. Data primer dihasilkan langsung oleh peneliti melalui metode seperti survei atau eksperimen, sehingga lebih spesifik dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Data sekunder, yang diambil dari sumber yang sudah ada seperti laporan atau artikel, berguna untuk membangun konteks atau menambah wawasan, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan fokus penelitian (*Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110, 2024*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga Teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan informan secara sengaja oleh peneliti dengan mempertimbangkan bahwa mereka memiliki informasi penting dan relevan dengan yang peneliti sedang teliti. Setelah data terkumpul keabsahan data sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas hasil penelitian, mengingat sifat kualitatif yang sangat bergantung pada interpretasi dan konteks. Lincoln & Guba (1985) dalam bukunya *Naturalistic Inquiry* memperkenalkan dua kriteria yang disebut sebagai *trustworthiness criteria* (kriteria keabsahan penelitian kualitatif) untuk menggantikan konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Meningkatkan ketekunan peneliti, triangulasi sumber dan Teknik.

C. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Implementasi Kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Kepatuhan Pramuwisata di Destinasi Tirta Empul

Penelitian ini dilaksanakan di Destinasi Wisata Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata budaya dan religi dengan karakteristik sebagai kawasan suci serta memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Karakteristik tersebut

menempatkan pramuwisata sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan karena tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai sejarah, filosofi, adat istiadat, dan tata cara berkunjung sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan standar penyelenggaraan kepariwisataan menjadi aspek yang penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk kepatuhan pramuwisata dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan terhadap profesi pramuwisata. Namun demikian, kewenangan Dinas Pariwisata hanya terbatas pada fungsi pembinaan dan pengawasan, sedangkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antarinstansi sehingga setiap aktor mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan telah dilakukan secara cukup baik. Dinas Pariwisata secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pramuwisata dan pelaku usaha pariwisata melalui seminar, pelatihan, pembinaan, maupun inspeksi lapangan. Informasi mengenai kewajiban memiliki lisensi pramuwisata, penggunaan pakaian adat Bali ketika bertugas, serta kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar telah dipahami oleh sebagian besar pramuwisata resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa substansi kebijakan telah tersampaikan secara jelas kepada pelaksana sehingga tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai tujuan maupun isi kebijakan. Temuan ini selaras dengan pendapat George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti pramuwisata yang belum memiliki lisensi resmi, tidak menggunakan pakaian adat Bali ketika bertugas, serta pengemudi wisata yang menjalankan fungsi sebagai pramuwisata tanpa memiliki kewenangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku seluruh pelaku pariwisata. Dengan kata lain, penyampaian informasi yang baik belum tentu diikuti oleh kepatuhan apabila tidak didukung oleh kesadaran individu dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten.

Pengelola Destinasi Tirta Empul juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung implementasi kebijakan melalui pemasangan papan informasi, penyediaan brosur mengenai sejarah dan tata tertib kawasan suci, serta penyediaan pramuwisata lokal yang memiliki pemahaman mendalam mengenai budaya dan filosofi Tirta Empul. Akan tetapi, pengelola hanya dapat melakukan pembinaan secara persuasif karena tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan masih menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan aturan.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta sertifikasi budaya bagi calon pramuwisata. Program tersebut bertujuan menciptakan pramuwisata yang profesional, memiliki kemampuan berbahasa asing, sekaligus memahami nilai-nilai budaya Bali sebagai identitas utama pariwisata daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pramuwisata resmi masih belum sebanding dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Ketidakseimbangan tersebut membuka peluang munculnya praktik pemanduan oleh individu yang tidak memiliki lisensi resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai profesionalisme seorang pramuwisata. Sebagian informan berpendapat bahwa kepemilikan lisensi merupakan syarat utama sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, terdapat informan yang menilai bahwa pemahaman terhadap budaya, adat istiadat, dan filosofi Bali memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan kepemilikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Menurut mereka, seseorang yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan budaya Bali memiliki pengalaman kultural yang memungkinkan penyampaian informasi kepada wisatawan menjadi lebih mendalam. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menyangkut kompetensi substantif yang dimiliki oleh seorang pramuwisata. Meskipun demikian, dalam perspektif implementasi kebijakan, kedua aspek tersebut seharusnya saling melengkapi sehingga profesionalisme pramuwisata tidak hanya diukur melalui pengalaman budaya, tetapi juga melalui pengakuan kompetensi yang diberikan oleh pemerintah.

Aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Sebagian besar pramuwisata resmi menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah dengan melakukan perpanjangan lisensi secara berkala, mengikuti sertifikasi budaya, serta menjalankan tugas sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hasil observasi memperlihatkan bahwa masih terdapat pelaku pariwisata yang belum memiliki komitmen serupa, terutama pengemudi wisata yang tetap memberikan penjelasan kepada wisatawan meskipun tidak memiliki kewenangan sebagai pramuwisata. Praktik tersebut dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada wisatawan, namun di sisi lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi pramuwisata resmi yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun kompetensi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana untuk mematuhi kebijakan secara sukarela.

Penelitian juga menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya pelanggaran terhadap kebijakan. Sebagian informan mengemukakan bahwa proses memperoleh lisensi membutuhkan biaya dan tahapan administrasi yang relatif panjang sehingga menjadi kendala bagi sebagian pelaku pariwisata. Selain itu, beberapa agen perjalanan memilih memanfaatkan jasa pengemudi sebagai pemandu wisata untuk menekan biaya operasional dan menawarkan harga paket wisata yang lebih murah kepada wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama yang mengurangi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, meskipun pelaku pariwisata telah mengetahui aturan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan sebenarnya telah memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dinas Pariwisata Provinsi Bali bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penegakan hukum, Himpunan Pramuwisata Indonesia berperan sebagai organisasi profesi yang membina anggotanya, sedangkan pengelola destinasi bertanggung jawab menjaga ketertiban di kawasan wisata. Meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan masih belum optimal. Kegiatan inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah belum berlangsung secara rutin sehingga masih ditemukan praktik pemanduan oleh individu yang tidak memiliki lisensi resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas struktur birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pembagian kewenangan, tetapi juga oleh intensitas koordinasi, konsistensi pelaksanaan tugas, dan komitmen setiap lembaga dalam menegakkan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar penyelenggaraan kepariwisataan terhadap kepatuhan pramuwisata di Destinasi Tirta Empul telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi telah terlaksana dengan baik melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan seluruh pelaku pariwisata. Pada aspek sumber daya masih terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pramuwisata resmi, sedangkan pada aspek disposisi masih ditemukan pelaku pariwisata yang belum menunjukkan komitmen dalam mematuhi regulasi. Sementara itu, aspek struktur birokrasi telah memiliki pembagian kewenangan yang jelas, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sinergi antarinstansi, komitmen para pelaksana kebijakan, serta peningkatan kesadaran seluruh pelaku pariwisata dalam menjaga profesionalisme profesi pramuwisata dan kelestarian budaya Bali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika implementasi kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata pada kepatuhan pramuwisata di Destinasi Tirta Empul, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas, profesional, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut memberikan landasan normatif bagi pramuwisata dalam menjalankan tugas kependuan wisata, khususnya terkait kewajiban kepemilikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), penggunaan busana adat Bali, serta penerapan etika profesi dalam pelayanan kepada wisatawan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat kepatuhan yang optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pramuwisata di kawasan Destinasi Tirta Empul.

Ditinjau dari aspek komunikasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pemerintah daerah melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi dan jangkauan penyampaian informasi kepada seluruh pramuwisata. Kondisi tersebut berimplikasi pada masih adanya perbedaan pemahaman dan tingkat kesadaran pramuwisata terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aktivitas kependuan wisata.

Dari aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Satpol PP, pengelola destinasi, serta organisasi pramuwisata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, keterbatasan intensitas pengawasan, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta masih adanya pramuwisata yang kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pelaksana kebijakan serta kepatuhan aktor yang menjadi sasaran kebijakan.

Secara keseluruhan, dinamika implementasi kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata pada kepatuhan pramuwisata di Destinasi Tirta Empul menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan profesionalisme pramuwisata dan menjaga kualitas penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan tingkat kepatuhan pramuwisata terhadap standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan kebijakan untuk mewujudkan pariwisata budaya Bali yang berkelanjutan, berdaya saing, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dapat tercapai secara lebih efektif dan berkesinambungan.

E. Referensi

- Aprilliani, N., Garvera, R. R., & Anwar, A. N. R. (2022). Pengembangan kapasitas pramuwisata di objek wisata pantai pangandaran oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangandaran. *Inkripsi*, 2(2), 3699–3708.
- Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 110. (2024). 5(September), 110–116.
- Qomaruddin & Sa'diyah. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: اما يهو ةدالما ةهيج نم لبولا ينتهيج نم نوكي ءاطلخاو سايقلا في اطلخا نع زاترحلا جاتنلا* / ةحص نم بجاولا ةقد اص ةيضقب ةدساف ةيضق سبتلت نابف نعلما ةيجنا نم اماو لاق نا لب نعلما ةيجنا. 2(1), 84–77).
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Jurnal Masohi*. 02.
- Sutrisna, A., & Lestari, S. P. (2021). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di Era Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 62.

<https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.224>

Wijaya, N. S., Darsana, I. M., Wayan, N., Sari, M., & Yani, A. (2022). *Kajian Strategi Pemasaran Destinasi Wisata Warisan Budaya Dunia (WBD) Pura Tirta Empul Tampaksiring Gianyar*. 10(1), 183–192.

Winata, T. R., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, dan L. P. (2022). Pengenaan Sanksi Terhadap Pramuwisata yang Tidak Berijin dalam Bidang Perjalanan Wisata. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 119–124. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>